



## MENDAYAGUNAKAN PENINGGALAN SEJARAH, MEWARISKAN HARMONI: KONSTRUKSI MODEL HARMONI SOSIAL KEHIDUPAN MULTIETNIS MENGGUNAKAN TEKS ISTANA DALAM LOKA

Kasimanuddin Ismain<sup>a</sup>, Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim<sup>b</sup>

*Kasimanuddin.ismain.fis@um.ac.id, moch.nurfahrul.fis@um.ac.id*

<sup>a</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia.

<sup>b</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia.

### ARTICLE INFO

Received: 11<sup>th</sup> January 2021

Revised: 28<sup>th</sup> October 2021

Accepted: 5<sup>th</sup> December 2021

Published: 30<sup>th</sup> December 2021

### Permalink/DOI

10.17977/um021v15i22021p377-390

Copyright © 2021.  
Sejarah dan Budaya  
Email: [jsb.journal@um.ac.id](mailto:jsb.journal@um.ac.id)  
Print ISSN: 1979-9993  
Online ISSN: 2503-1147

### ABSTRACT

The meaning of social harmony in the Dalam Loka Palace is reflected in the layout and architecture of multi-ethnic city. The learning model research methods include problem analysis, formulating a draft model, expert validation, model revision stage 1, limited trial of the initial model, model revision stage 2, extensive trial, final revision, and model preparation. Through validation and testing, a suitable model has been produced to foster the harmony of multiethnic life. The uniqueness of the model is the partnership of the regent as regional leader and the sultan as the holder of the Samawa tradition and culture according to the regional motto of Sabalong Samalewa. With the uniqueness of the model, it is hoped that it can eliminate the potential for conflict through the implementation of policies on internal and external factors of the model in development in the area concerned, which touches various aspects of multi-ethnic life.

### KEYWORDS

model construction; social harmony; Sultanate of Sumbawa; Sabalong Sama Lewa.

### ABSTRAK

Makna kerukunan sosial di Keraton Dalam Loka tercermin dalam tata ruang dan arsitektur kota multietnis. Metode penelitian model pembelajaran meliputi analisis masalah, merumuskan rancangan model, validasi ahli, revisi model tahap 1, uji coba terbatas model awal, revisi model tahap 2, uji coba ekstensif, revisi akhir, dan penyusunan model. Melalui validasi dan pengujian, dihasilkan model yang cocok untuk membina kerukunan hidup multietnis. Keunikan model tersebut adalah kemitraan bupati sebagai pemimpin daerah dan sultan sebagai pemegang tradisi dan budaya Samawa sesuai semboyan daerah Sabalong Samalewa. Dengan keunikan model tersebut, diharapkan dapat menghilangkan potensi konflik, melalui penerapan kebijakan faktor internal dan eksternal model dalam pembangunan di daerah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan multi etnis.

### KATA KUNCI

konstruksi model; kerukunan sosial; Kesultanan Sumbawa; Sabalong Sama Lewa.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan integrasi masyarakat suku, terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang (Zuhdi, 2014). Kajian terhadap masyarakat suku atau masyarakat multietnis dalam Sejarah Indonesia dilakukan antara lain oleh Sulistiyono (2011) menggunakan konsep diaspora. Secara historis kepulauan Indonesia disebut sebagai land of diaspora. Perjalanan Sejarah Indonesia menjadi masyarakat multietnis diwarnai migrasi etnis-etnis disertai isu-isu lintas budaya dengan segala kompleksitasnya di daerah yang didatangi.

Realitas sosio-kultural ini sepanjang sejarah keIndonesiaan kita, ditinjau dari perspektif Pascastrukturalisme, telah menghadirkan wajah yang ambigu. Di satu sisi, kita selalu membanggakan kekayaan dan keunikan kebudayaan dari berbagai etnis yang ada, namun di sisi lain, realitas konflik antar etnis dan bayang-bayang akan meletusnya konflik antar etnis senantiasa mengiringi dinamika perjalanan sejarah keIndonesiaan kita.

Bayang-bayang konflik antar etnis yang mengiringi dinamika sejarah Indonesia, antara lain seperti konflik Suku Melayu berhadapan dengan Suku Madura di Sambas (1996-1997), Suku Dayak melawan Suku Madura di Kalimantan Tengah (2001), penganut Kristen Ambon melawan etnis Buton, Bugis, Makasar di Ambon (1999), konflik berbagai kelompok etnis di Poso (2001) (Marzali, 2003:15). Konflik etnis Sumbawa dengan etnis Bali tahun 1980 berulang tahun 2003, dan 2013. Fakta sejarah menunjukkan etnis yang pernah berkonflik, berpotensi berkonflik lagi.

Permasalahannya, mengapa konflik bernuansa etnis di Sumbawa berulang? Apakah karena resolusi konflik tidak berdasarkan modal sejarah-budaya (Suparlan, 2010), sehingga tidak menghilangkan potensi konflik? Adanya stereotip negatif pada etnis minoritas (Suyitno, 2015) apakah ini penyebabnya? Ataukah ada faktor lain, karena diduga terdapat kompleksitas faktor melatarbelakanginya (Marsali, 2011).

Untuk menjawab permasalahan di atas, sekaligus mengantisipasi terulangnya konflik, mendesak dan penting dikembangkan Model Harmoni Sosial Kehidupan Multi Etnis dari Sejarah Lokal Masa Kesultanan Sumbawa melalui Perspektif Pasca Strukturalisme. Gambaran model dirumuskan secara visual dan simbolik menggunakan teks Istana Dalam Loka, situs rumah panggung kembar warisan Kesultanan Sumbawa (Ismain, 2019). Bangunan ini menampilkan simbolik harmoni etnis Sumbawa dengan etnis Bugis Makassar berdasarkan kemiripannya dengan Balla Lompoa, istana Sultan Gowa (Ismain, 2019).

Rumusan model yang akan dicapai melalui penelitian pengembangan ini mengacu pada pandangan Tim Puslitjaknov (2008), yaitu: (1). menggambarkan struktur model yang digunakan secara singkat, sebagai dasar pengembangan produk; (2) apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen.

Model yang digunakan di sini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Peneliti memaparkan model, berupa komponen-komponen yang membentuk model serta kaitan antar komponen yang terlibat dalam pengembangan. Model yang dirancang dalam penelitian ini adalah model Pendekatan Kontekstual, yakni suatu model yang strukturnya mengakomodasi keunikan-keunikan dimensi sosial budaya serta kompleksitas masalah yang terdapat pada masyarakat multi etnis Sumbawa. Konstruksi model mengakomodasi

keunikan faktor internal dan faktor eksternal multietnis di Sumbawa. Rumah harmoni sosial ini, dinaungi oleh teks dua atap yang satu kesatuan yakni Sultan Sumbawa sebagai simbol sejarah dan budaya. Dua badan bangunan merupakan teks faktor internal dan eksternal yang berkontribusi bagi dekonstruksi harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa.

Faktor internal diadopsi dari kehidupan multi etnis masa Kesultanan Sumbawa (Ismain, 2019). Teks faktor eksternal diadopsi dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik, yang diteliti lebih lanjut dalam sejarah lokal kontemporer Sumbawa. Fakta historis faktor eksternal ini diduga dapat mengungkap akar penyebab disharmoni sosial, yang berujung berulangnya konflik etnis.

Dengan menggunakan perspektif Pasca Strukturalisme, akan dibongkar selubung teks konflik untuk menemukan tafsir baru yang konstruktif bagi model harmoni yang dikembangkan. Model yang sudah lebih konkrit divalidasi, diuji-coba, ditelaah collaborator asing untuk menghasilkan model final yang siap diimplementasikan. Pembelajaran sejarah dengan model yang tepat penting untuk meningkatkan kesadaran sejarah siswa (Khakim, 2018).

## **METODE**

Tulisan ini menindaklanjuti penelitian tahun 2019 mengenai kehidupan multi etnis masa Kesultanan Sumbawa, yang sudah dipublikasikan dalam artikel jurnal (Ismain, 2019) dan monograf (Ismain, 2019). Selain itu, kajian sejarah lokal ini juga berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti antara lain pembelajaran sejarah seni melalui museum musik kota Malang sebagai pelopor museum musik di Indonesia (Khakim dkk., 2019), pembuatan papan informasi dan perawatan situs Sejarah Kolonial Belanda Makam Dinger di Batu Malang (Khakim dkk., 2020), dan pemetaan potensi geografi wisata pada budaya Barong Ider Bumi Banyuwangi (Khakim dkk., 2020). Kajian sejarah lokal dengan nilai-nilai pendidikan tersebut dapat melengkapi penelitian kali ini. Hasil penelitian itu dikembangkan menjadi model harmoni sosial sebagai objek penelitian.

Gambaran teoritis objek penelitian ini adalah struktur model yang terbangun atas relasi berbagai komponen, yakni: faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal berdasarkan fakta sejarah kehidupan harmoni multi etnis di Kesultanan Sumbawa. Konstruksi Model bersifat fleksibel dan terbuka secara Kontekstual, dan Perbaikan Model Kontekstual Secara Berkelanjutan. Objek lainnya adalah realitas kekinian masyarakat multietnis di Sumbawa, diteliti melalui sejarah lokal kontemporer.

Sebagai kelanjutan penelitian tahun 2019, lokasi utama tetap di Sumbawa Besar, didasarkan fakta historis ibukota Kesultanan Sumbawa berada di kota ini, yang menampilkan kehidupan multi etnis sampai sekarang, namun konflik etnis pernah terjadi. Di kota ini dilakukan uji coba terbatas dan meluas, dengan subjek generasi lintas etnis dari Sumbawa, Jawa, Bali, Sasak, dan lain-lain. Lokasi lainnya adalah Mataram untuk melakukan studi kepustakaan di Museum dan Perpustakaan daerah Nusa Tenggara Barat. Data dikumpulkan melalui metode angket, wawancara, studi kepustakaan atau kearsipan, dan dokumentasi.

Prosedur penelitian yang digunakan mengacu pada Borg dan Gall (1983) yakni meliputi melakukan analisis persoalan, merumuskan draft model, validasi ahli, revisi

model tahap 1, uji coba secara terbatas model awal, revisi model tahap 2, tahap uji coba meluas, revisi akhir, dan penyusunan model final.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Harmoni Sosial Masa Kesultanan**

Kehidupan harmoni sosial tumbuh dan berkembang sejak zaman pra-kesultanan. Pada zaman Praaksara kehidupan harmoni dicerminkan oleh asal usul Tau Tepal (etnis asli Sumbawa) yang diperkirakan percampuran ras Melayu Austronesia yang sudah ada di Sumbawa dengan etnis Sasak.

Sejak zaman Hindu Budha etnis Sumbawa makin terbuka menerima etnis pendatang dan bebas memiliki tanah (Tanah Panyaka) berdasarkan prinsip "tumpuan aeng-aeng, tu tumpuan nan tau baeng" (orang yang menjumpainya itulah yang memilikinya). Kehidupan harmoni terjalin dengan Jawa melalui saluran niaga yang mendatangkan pengaruh Hindu Budha pada kerajaan-kerajaan kecil di Sumbawa. Dewa Awan Kuning raja Hindu di Sumbawa berkunjung ke Majapahit dan diterima dengan penuh persahabatan mencerminkan kehidupan harmoni etnis Sumbawa dengan Jawa dari segi politik. Kehidupan harmoni dengan etnis Bali terjalin melalui saluran perkawinan, dan politik berdasarkan kesamaan keyakinan pada masa Hindu-Budha. Hal ini didukung oleh adanya bangunan Pura Semawa di Sanur Bali yang didirikan pada abad 13 (Ardiansyah, 2018:24), jauh sebelum berdirinya Kesultanan Sumbawa. Pada masa kesultanan, masih digunakannya gelar para pejabat kesultanan seperti dewa, permeal diduga pengaruh dari Bali (Haris, 2015).

Kesultanan Sumbawa berdiri sebagai bagian kekuasaan Kesultanan Gowa, telah menyuburkan kehidupan harmoni yang sudah terjalin melalui saluran ekonomi-perdagangan dengan etnis Bugis Makassar. Etnis ini mendiami kampung Bugis, yang diberi status sebagai kampung tamu kesultanan dipimpin oleh Karaeng Matoa. Di kalangan elite kesultanan terjalin harmoni sosial dengan elite dari etnis Bugis Makassar melalui saluran perkawinan (Manca, 1984). Di bidang arsitektur, harmoni dengan etnis Bugis Makasar dicerminkan oleh tinggalkan istana Dalam Loka. yang memiliki kemiripan dengan istana Balla Lompoa di Gowa (Ismain, ). Di bidang politik pemerintahan diadopsi Hadat Syara' yang mengharmonikan adat dan agama (Adat Barenti ko Syara', Syara' barenti Kitabullah Taket ke Nene), selanjutnya menjadi kepribadian atau karakter etnis Sumbawa.

Kehidupan harmoni dengan etnis Sasak terjalin melalui bidang sosial-ekonomi, berkat kedekatan geografis pulau Sumbawa dengan pulau Lombok. Di bidang politik, pada masa Mas Cini Kesultanan Gowa mengintegrasikan Selaparang Lombok dengan Kesultanan Sumbawa pada tahun 1640. Pusat Kesultanan Sumbawa yang berkedudukan di Salaparang dipindahkan ke Sumbawa, namun harmoni dengan etnis Sasak tetap terjaga, karena Salaparang menjadi kamutar empat, sebagai vasal Kesultanan Sumbawa (Soelkan, 1998).

Kehidupan harmoni dengan etnis Jawa sudah terjalin sejak pra-kesultanan melalui saluran perdagangan dan politik. Pada masa Dewa Awan Kuning terjalin hubungan politik dengan Majapahit. Ada juga yang datang ke kesultanan dengan misi Islamisasi, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Prapen dan rombongan, konon sekitar 10.000 orang

Jawa. Pada tahap pertama, Islamisasi dilakukan terhadap sultan dan pejabat kesultanan. Hal ini diberitakan dalam Babad Lombok Pupuh 838-930 (Musbiawan, 2018: 172-174) yang peneliti rangkum berikut ini: Wahai sekalian orang Jawa, kita berangkat untuk mengislamkan Sumbawa. Sesampainya di pelabuhan sunan Prapen menjelaskan kepada syahbandar kesultanan maksud kedatangannya tidak untuk merusak dan berlaku kejam, tetapi hanya untuk menerangi kalbu mengikuti perintah Allah dalam Al-Qur'an. Sultan memberi tempat pemukiman orang Jawa di kampung Jawa, di ibukota kesultanan.

Seorang etnis Timor datang ke Sumbawa tahun 1933, kemudian diangkat sebagai pengawal kesultanan oleh Sultan Kaharuddin III. Sejak itu makin banyak pendatang etnis Timor, sehingga mendorong sultan memberikan tanah untuk membangun rumah penampungan sementara, yang mereka sebut sebagai rumah persatuan. Mendesak pula kebutuhan gereja sebagai tempat ibadah, ternyata mendapat perhatian Sultan Kaharuddin III, yang mengeluarkan surat keputusan hibah tanah untuk dibangun gereja pada tanggal 8 Juli 1940 (Fisabilillah, 2018).

Para etnis pendatang ke Sumbawa membawa pengaruh terhadap bahasa dan budaya, bentuk tubuh dan warna kulitnya, sehingga tau Samawa yang saat ini mendiami Kabupaten Sumbawa merupakan percampuran dari banyak etnis yang kemudian hidup harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Tau Samawa terjadi dan berulangnya konflik dengan keragaman budaya yang dimilikinya (Raba, 2002). Kehidupan harmoni ini disebabkan oleh adanya kearifan lokal Adat barenti ko Syara, Syara barenti Kitabullah Taked Ko Nene. Ungkapan kearifan lokal "mana tau barang kayu, lamen to nyaman ate banan si sanak paranak", artinya siapapun dia, asal bisa memberi ketenangan, persahabatan dan persaudaraan. Berabad-abad harmoni sosial terjalin dengan baik dalam kehidupan antar etnis di Sumbawa, sehingga setiap etnik merasa dirinya "kita srea tau Samawa" atau kita semua orang Sumbawa. Sumbawa terkenal kemajemukannya dan paling terbuka bagi pendatang (Kompas, 22 Januari 2013).

Implementasi teori dekonstruksi dalam studi ini dilakukan dengan penggunaan gagasan-gagasan utama Derrida yang sudah disinggung di atas untuk menganalisis harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa dengan memanfaatkan teks-teks sejarah lokal. Penerapan analisis pasca strukturalisme ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, studi ini memaknai fenomena harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa sebagai teks, yakni rangkaian simbol yang memiliki makna-makna yang tak terbatas. Teks di sini seturut dengan pemikiran Derrida bukanlah realita tentang harmoni sosial dan sejarah lokal itu sendiri, melainkan jejak-jejak (traces) dari harmoni sosial masyarakat multi etnis dan sejarah lokal Sumbawa.

Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang dipaparkan pada pendahuluan. Hasil dan pembaha-san sesuai dengan tujuan yang dipapar-kan pada pendahuluan. Hasil dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang di-paparkan pada pendahuluan.

### **Analisis Pasca Strukturalisme (Teori Dekonstruksi)**

Kerangka pemikiran yang melandasi studi tentang jejak-jejak dari harmonis sosial multi etnis dan sejarah lokal Sumbawa ini adalah kedua jejak teks tersebut dipengaruhi

(atau terjadi intertekstualitas dalam bahasa pascastrukturalisme) oleh berbagai jejak teks lain yang dalam studi ini disebut sebagai faktor internal dan eksternal. Melalui analisis terhadap praktek intertekstualitas tersebut akan dapat dirumuskan suatu model kontekstual tentang harmonis sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa berbasis sejarah lokal Sumbawa.

Kedua, jejak-jejak harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa yang dilacak melalui sejarah lokal ini memiliki makna yang bersifat plural, tidak bersifat final dalam arti makna dan kebenarannya mengalami penundaan, dipenuhi dengan paradoks dan ambiguitas. Gambaran tentang penerapan konsep-konsep tersebut dalam studi ini misalnya adanya pluralitas, penundaan, paradoks dan ambiguitas pemaknaan ketimpangan sosial, ekonomi dan atau politik antara etnis Sumbawa dan etnis-etnis pendatang yang dipandang sebagai salah satu faktor eksternal yang mengancam harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa. Data yang dikumpulkan melalui FGD menunjukkan bahwa para peserta yang berasal dari etnis Sumbawa dan Bali menyatakan tidak ada ketimpangan ekonomi antara etnis yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial pada tahun 1980 dan 2013. Peserta FGD dari etnis Sumbawa mengatakan bahwa warga lokal dari etnis Sumbawa memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para warga dari etnis pendatang. Pekerjaan yang tidak dilakukan oleh warga etnis Sumbawa dilakukan oleh warga etnis pendatang. Sementara itu peserta FGD dari etnis Bali menceritakan pengalaman hidupnya sejak pertama kali datang ke Sumbawa hingga sekarang ini justru banyak ditolong secara ekonomi oleh warga etnis Sumbawa. Pada waktu terjadi kerusuhan pada tahun 1980 dan 2013, warga dari etnis Bali tersebut justru dilindungi oleh warga dari etnis Sumbawa. Hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjadi PNS dan penjaga Istana Dalam Loka yang berasal dari etnis Sumbawa juga menyatakan bahwa tidak ada ketimpangan ekonomi antara etnis Sumbawa dengan etnis pendatang. Di sisi lain, berdasarkan data hasil wawancara dengan seorang PNS lain dari etnis Sumbawa justru menyatakan bahwa penyebab terjadinya kerusuhan pada masa itu adalah karena faktor pekerjaan (ekonomi). Pemberitaan di media massa dan hasil studi yang dilakukan oleh akademisi juga ada yang menyatakan bahwa terjadinya konflik antar etnis di Sumbawa akibat dari kesenjangan sosial, ekonomi dan politik antara etnis pendatang dengan etnis Sumbawa. Purnama (2013, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/783-rusuh-sumbawa-dan-peran-lembaga-adat>) dalam salah satu analisisnya menyatakan:

“Sejarah berulang. Konflik serupa pernah terjadi di Tana Samawa pada masa lampau. Ketegangan antara masyarakat asli Sumbawa terhadap pendatang dari Bali pernah mencapai puncaknya pada tahun 1980. Para pendatang Bali menguasai banyak lini strategis baik di sektor ekonomi, politik, dan birokrasi sebagai implikasi dari kebijakan sentralisasi pemerintah Orde Baru saat itu. Pengangkatan para pimpinan di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat”.

Gambaran tentang pluralitas pemaknaan teks-teks faktor eksternal dari berbagai sumber data tersebut sesuai dengan pandangan pasca strukturalisme bahwa terdapat

perbedaan pandangan antar berbagai pihak dalam memaknai kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat Sumbawa. Perlindungan terhadap warga etnis Bali (termasuk juga budaya Bali) sebagaimana dinyatakan peserta FGD juga tidak sepenuhnya terjadi pada warga etnis Bali lainnya jika mengacu pada teks berikut ini:

Aksi kekerasan terjadi di jalanan Sumbawa Besar. Kantong-kantong pemukiman orang Bali menjadi sasaran kemarahan warga. Terlebih setelah tewasnya seorang warga karena timah panas yang rumornya ditembakkan oleh salah seorang perwira polisi beretnis Bali. Setelah peristiwa itu maka ada aturan tidak tertulis untuk melakukan pembatasan pimpinan dari etnis Bali dalam lingkungan birokrasi Kabupaten Sumbawa. Kemudian orang Bali harus mengurangi intensitas dan skala pelaksanaan tradisinya di Sumbawa seperti upacara ngaben dan kirab keliling kota dengan berbagai tetabuhan (Satriani (ed), 2010, dalam Purnama, 2013).

Berpijak dari dua kutipan teks di atas dapat dianalisis disini bahwa terdapat fakta warga etnis pendatang (Bali) yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh warga etnis Sumbawa. Selain itu juga terdapat fakta bahwa terjadi ketimpangan ekonomi dan politik yang berkembang sejak masa Orde Baru dimana banyak warga etnis Bali yang menguasai sektor-sektor ekonomi dan posisi politik yang strategis di Sumbawa. Adanya aturan tidak tertulis pembatasan warga etnis Bali untuk menduduki posisi strategis dalam birokrasi di Sumbawa juga merefleksikan adanya ketimpangan dalam bidang politik. Dekonstruksi terhadap berbagai teks tentang ketimpangan sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat multi etnis di Sumbawa dapat digunakan sebagai bagian dari solusi persoalan harmoni sosial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Artinya, salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa adalah reduksi kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik antar etnis-etnis pendatang dengan etnis Samawa.

Dekonstruksi teks-teks kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik di Tana Samawa dapat digunakan untuk menemukan teks solusi harmoni sosial di masyarakat ini. Dekonstruksi yang dilakukan di sini adalah dengan mendialogkan teks-teks faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pencapaian harmonis sosial. Dalam hal ini teks-teks yang didialogkan dari faktor internal etnis Sumbawa antara lain: 1) kapasitas masyarakat Samawa dalam menghadapi dinamika politik lokal dan nasional serta globalisasi kapital, 2) komitmen masyarakat Sumbawa terhadap kesatuan budaya Sumbawa yang mengatasi perpecahan identitas budaya akibat pemekaran wilayah, 3) Redefinisi dan revitalisasi etos kerja dan kualitas SDM etnis Samawa untuk mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi dan politik dengan etnis-etnis pendatang. Teks-teks faktor eksternal yang perlu didialogkan antara lain mencakup: 1) Kebijakan politik nasional dan lokal yang melindungi masyarakat adat yang ada di Sumbawa, 2) Dukungan dan advokasi LSM, akademisi dan pemerhati terhadap berbagai aspek yang terkait dengan harmoni sosial di Tana Samawa, dan 3) Good will dan kebijakan pemerintah daerah dan pusat untuk mereduksi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik antar etnis di Sumbawa.

Selain pemaknaan yang bersifat plural, penerapan analisis pasca strukturalisme dalam studi ini juga dilakukan dalam penggunaan pandangan bahwa kebenaran tidak bersifat final, melainkan mengalami penundaan/penangguhan. Implementasi analisis pasca strukturalisme dalam penelitian ini terkait dengan pandangan kebenaran bersifat tidak final atau mengalami penangguhan dapat dilihat pada perbandingan kasus kegemilangan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa pada masa Kesultanan dengan munculnya konflik antar etnis yang berkembang sejak masa Orde Baru (konflik tahun 1980) dan berlanjut pada masa Reformasi (konflik tahun 2013). Hal ini bisa dilihat pada kutipan teks berikut ini:

Namun ternyata konflik besar yang pernah terjadi lebih dari dua dekade lalu pecah kembali. Kearifan lokal Sumbawa yang tergambar dari bait pantun “mana tau barang kayu lamento samanate bananse sanak paranak” yang artinya siapapun dia yang penting bisa melahirkan ketenangan, kebahagiaan, persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan itu bisa diterima dengan baik, harus kembali dibuktikan. Sumbawa tercatat telah memiliki sejarah panjang dalam interaksinya dengan para pendatang. Para Sultan Sumbawa memberi tanah bagi para pendatang yang jejaknya sampai sekarang masih bisa dilihat. Ada Kampung Marilonga (pendatang dari NTT), Kampung Jawa, Kampung Bali, Kampung Lombok, Kampung Bugis, Karang Banjar bahkan sultan mendirikan gereja untuk warganya yang beragama Nasrani. Dialog lintas etnis yang sudah dibangun sejak zaman kesultanan mengkondisikan masyarakat Sumbawa relatif terbuka (Purnama, 2013).

Teks tersebut menunjukkan bahwa kebenaran tentang harmoni sosial masyarakat multi etnis Sumbawa yang terjadi pada masa Kesultanan ternyata tidak sepenuhnya benar ketika Kesultanan Sumbawa bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang mengoyak bangunan indah harmoni sosial masyarakat Sumbawa di masa lalu menunjukkan bahwa hilangnya kekuasaan dan kewenangan Sultan Sumbawa pada masa pasca kemerdekaan (khususnya pada masa Orde Baru dan Masa Reformasi) membawa implikasi bagi rapuhnya bangunan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa pada masa kini. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlu ada upaya dekonstruksi terhadap peran dan fungsi Sultan Sumbawa di masa kini agar bangunan harmoni sosial di Tana Samawa bisa berdiri tegak dan kokoh kembali sebagaimana terjadi pada masa lalu. Dekonstruksi terhadap peran dan fungsi Sultan Sumbawa di masa kini tentu bukan pada ranah politik, mengingat kekuasaan politik Sultan Sumbawa di masa kini sudah tidak lagi eksis. Dekonstruksi yang perlu dilakukan terhadap peran dan fungsi Sultan Sumbawa di masa kini adalah penguatan simbol sultan sebagai penjaga dan pemersatu di ranah sejarah dan budaya agar tercipta harmoni sosial pada masyarakat multi etnis di Sumbawa. Pentingnya peran dan fungsi sultan di masa kini dapat dilihat pada saat terjadi letusan konflik dalam menenangkan massa sehingga dapat meredam eskalasinya tidak semakin meluas. Selain itu, modal simbolik dan budaya Sultan sebagai Pemimpin Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) memungkinkan

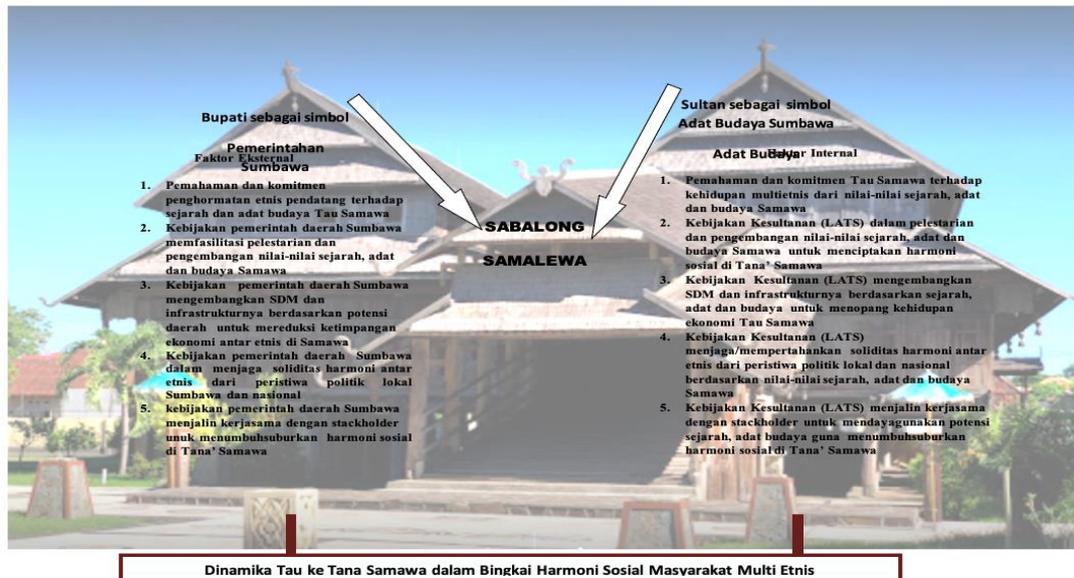
beroperasinya lembaga kesultanan sebagai pemersatu dan pengayom berbagai etnis yang ada di Sumbawa, sebagaimana dinyatakan dalam teks berikut ini :

Situasi yang terjadi di Sumbawa saat ini merupakan momentum tepat untuk menunjukkan eksistensi dan peran Lembaga Adat Tana Samawa yang sudah direvitalisasi. Kehadiran Sultan Sumbawa atau yang kerap disapa dengan Daeng Ewan untuk menenangkan massa kemarin sebaiknya diikuti dengan langkah-langkah yang lebih sistematis demi resolusi konflik yang efektif. LATS harus mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari intermediary actors yang prima sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Adat pada 8-10 Januari 2011 lalu. LATS diharapkan menjadi jembatan mediasi bila terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Payung hukum lewat Perda Kabupaten Sumbawa No. 23 2007 juga memberikan tugas bagi LATS untuk bisa berperan menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat (Purnama, 2013).

Implementasi yang ketiga dari teori pasca strukturalisme terhadap teks-teks yang terjalin dalam fenomena harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa di atas adalah berbagai teks tersebut tidak ada yang memiliki posisi pusat dan pinggiran. Masing-masing teks dipandang memiliki posisi yang setara dan tidak berposisi biner. Teks-teks yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan, FGD dan studi pustaka semuanya memiliki posisi yang setara. Tidak ada teks yang mendominasi teks-teks lainnya. Pandangan para informan yang bertentangan dengan pernyataan para peserta FGD atau teks hasil studi pustaka tentang suatu hal yang terkait dengan harmoni dalam studi ini tidak dimaknai berposisi biner. Pandangan-pandangan atau pernyataan-pernyataan yang bertentangan dari berbagai sumber tersebut dalam studi ini didekonstruksi untuk menemukan makna baru yang konstruktif bagi penciptaan model harmoni sosial masyarakat multi etnis Sumbawa.

Ilustrasi tentang penerapan pandangan pasca strukturalisme tersebut dalam studi ini misalnya pada teks faktor eksternal transparansi, kesigapan, dan ketegasan aparat dalam menjaga harmoni sosial. Semua data yang diperoleh dari wawancara mendalam, FGD dan studi pustaka menyatakan bahwa meletusnya konflik di Sumbawa tidak terlepas dari ketertutupan pihak kepolisian dalam kasus kematian wanita yang berasal dari etnis Sumbawa serta pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat konflik itu mulai terjadi. pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan berakibat massa menjadi semakin marah sehingga melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap berbagai bangunan dan fasilitas ibadah. Teks faktor eksternal tentang transparansi, kesigapan, dan ketegasan aparat dalam menjaga harmoni sosial ini tidak dipandang memiliki posisi pusat ataupun pinggiran bila didialogkan dengan berbagai teks lain baik yang berupa teks faktor eksternal lainnya maupun teks-teks faktor internal. Misalnya, teks faktor eksternal lainnya yang dipandang memiliki kontribusi bagi penciptaan harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa adalah pengetahuan dan komitmen penghormatan etnis-etnis pendatang terhadap budaya Sumbawa. Teks-teks yang terkait dengan pengetahuan dan

komitmen penghormatan etnis-etnis pendatang terhadap budaya Sumbawa yang berasal dari peserta FGD umumnya menyatakan bahwa gesekan dan konflik yang terjadi dikarenakan warga dari etnis-etnis pendatang yang kurang memahami terhadap budaya masyarakat Sumbawa. Inti kebudayaan Sumbawa adalah seperti tertuang dalam Rapang Tana Samawa yang menyatakan “Adat barenti ko syara’, syara’ barenti kitabullah” (Adat berpedoman pada syariat, syariat berpedoman pada kitab suci Al Qur’an). Ketua MUI Sumbawa, Nadi Husain menyatakan bahwa budaya Sumbawa menempatkan agama dan wanita pada posisi yang sakral. Pelanggaran terhadap nilai budaya ini akan berpengaruh terhadap harmoni sosial yang ada di Sumbawa.



**Gambar 1.** Bagan Alur Model Istana Loka (sumber: dokumen pribadi)

Mengacu pada pandangan Gasche di atas maka penelitian berupaya mengidentifikasi hirarki yang terdapat dalam berbagai teks tentang harmoni sosial dan konflik etnis di Sumbawa (baik yang berupa ungkapan, peristiwa, pemberitaan di media massa). Dalam konteks penelitian ini, identifikasi terhadap hirarki teks misalnya dari teks hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa konflik yang meletus di Sumbawa bukan konflik etnis, melainkan hanya dilakukan oleh oknum. Pernyataan tersebut sebagai sebuah teks dalam perspektif Derrida perlu dibongkar, misal dengan menanyakan apa benar itu hanyalah ulah oknum? Terlalu menekankan pada teks oknum akan menyembunyikan berbagai teks lain seperti memudarnya solidaritas sosial kedua etnis, ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya etos kerja yang juga dikemukakan oleh informan yang bersangkutan. Analisis terhadap pembongkaran teks dalam penelitian ini mengarah pada berbagai kontradiksi dan paradoks pernyataan yang dikemukakan oleh informan tersebut. Misalnya, pernyataan informan yang mengatakan bahwa warga lokal etnis Sumbawa justru tidak ada yang berjualan kuliner Sumbawa, sementara berbagai etnis pendatang justru banyak menjual kuliner etnis masing-masing. Melalui pembongkaran terhadap berbagai teks berita tersebut akan dapat dirumuskan teks baru yang mengarah pada konstruksi baru relasi etnisitas yang harmonis, bukan dengan cara

mempertentangkan dengan konflik, melainkan justru mendialogkan antara konflik dan harmoni.

Model ini terbangun atas komponen yang saling berkaitan, yakni Faktor-faktor Internal, Faktor-faktor Eksternal. Konstruksi model ini bersifat Kontekstual, dan Perbaikan Model Kontekstual Secara Berkelanjutan. Faktor-faktor Internal adalah faktor yang berasal dari budaya antar etnis Sumbawa dan Bali yang ditengarai menjadi akar terjadinya konflik antara dua etnis tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar budaya kedua etnis tersebut yang dipandang terkait dengan terjadinya konflik antara dua etnis tersebut (misal, ketimpangan akses sumberdaya ekonomi dan politik).

Perpaduan antara komponen-komponen Faktor Internal dan Faktor Eksternal di atas akan berpengaruh terhadap komponen konstruksi model harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa yang berbasis modal sosial Sejarah Lokal melalui perspektif Pascastrukturalisme Konstruksi model yang dikembangkan mengakomodasi keunikan Faktor Internal dan Eksternal yang terdapat pada sejarah masyarakat kedua etnis tersebut.

Komponen Perbaikan Model Kontekstual secara berkelanjutan memiliki fungsi adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Komponen ini berfungsi untuk merespon berbagai aspek yang terkait dengan dinamika sosial masyarakat multietnis sehingga model ini lebih sensitif, responsif serta relevan dengan perubahan yang terus bergulir.

Butir-butir harmoni kehidupan multietnis di Sumbawa dalam model ini terdapat pada teks tubuh badan bangunan istana, terdiri dari teks-teks faktor internal dan eksternal yang memberi ruang dan kontribusi bagi dekonstruksi harmoni sosial masyarakat multi etnis di Sumbawa. Teks faktor internal berada di dalam pengayoman sultan dan dijalankan oleh LATS meliputi

1. Pengetahuan tau Samawa tentang sejarah kehidupan multi etnis dan adat budaya Samawa sejak masa kesultanan Sumbawa
2. Peran LATS dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sejarah & adat budaya Samawa.
3. Penguatan peran LATS meredefinisi dan revitalisasi etos kerja dan kualitas SDM tau Samawa mengatasi kesenjangan dengan etnis-etnis pendatang.
4. Kapasitas tau Samawa dalam menghadapi dinamika politik lokal dan nasional serta globalisasi kapital.
5. Komitmen tau Samawa terhadap kesatuan budaya Samawa yang mengatasi perpecahan identitas budaya

Adapun teks faktor eksternal berada di dalam pengayoman bupati dan dijalankan oleh organ dan aparatur birokrasi, meliputi:

1. Pengetahuan dan komitmen penghormatan etnis pendatang terhadap sejarah dan adat budaya Sumbawa.
2. Kebijakan pemerintah daerah memfasilitasi akomodatif dan toleran terhadap pelestarian dan pengembangan nilai sejarah dan adat budaya Sumbawa.

3. Goodwill dan kebijakan pemerintah daerah mengembangkan SDM untuk mereduksi ketimpangan antar etnis di Sumbawa.
4. Kebijakan politik lokal dan nasional yang melindungi masyarakat adat dari dinamika konflik di Sumbawa.
5. Dukungan nyata berbagai kalangan (akademisi/LSM) dan kesigapan aparat menjaga harmoni sosial di Sumbawa.

### **Deskripsi model**

Model harmoni sosial masyarakat multietnis di Sumbawa secara simbolik menggunakan teks bangunan Istana Dalam Loka, istana Sultan Sumbawa yang dibangun tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddinsyah III (1883-1931) (Manca, 1984). Bangunan yang pernah diteliti oleh Ismain, arsitekturnya merupakan gabungan dua buah bangunan rumah panggung ukuran besar bertingkat dua dengan kemuncak hiasan Bangkung, terdiri dari dua atap limas bersusun, dua tubuh bangunan, disangga 99 tiang rumah, serta dua anak tangga di bagian depan dan belakang. Makna simbolik bangunan terkait dengan religiusitas masyarakat, sebagaimana terdapat pada hiasan Bangkung sebagai simbol Bouraq (kendaraan Nabi Muhammad), 17 anak tangga simbol 17 rakaat Sholat Lima Waktu, 99 tiang simbol dari Asma'ul Husna Jadi tiang-tiang yang menyangga dalam model ini adalah teks sejarah dan budaya yang mencerminkan religiusitas berbagai etnis yang ada di Sumbawa.

Konstruksi model di bawah ini secara simbolik menempatkan Sultan dan Bupati Sumbawa di kedua atap bangunan istana, seturut dengan fungsi atap yang melindungi dan mengayomi penghuninya, dalam hal ini masyarakat Sumbawa. Sultan mengayomi dari segi adat dan budaya melalui faktor-faktor internal, bupati mengayomi dari segi pemerintahan daerah melalui faktor-faktor eksternal. Dua kutub kepemimpinan ini seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menampilkan harmoni kolaborasi (anak panah dalam gambar model) karena secara filosofis diikat oleh motto daerah Sumbawa yaitu Sabalong Samalewa yang bermakna kebulatan tekad masyarakat Sumbawa melaksanakan pembangunan dengan adil, serasi, selaras dan berkesinambungan (Raba, 2002) baik material maupun spiritual. Kebijakan-kebijakan sultan dijalankan oleh Lembaga Adat Tana' Samawa (LATS), sedangkan kebijakan bupati dijalankan oleh organ birokrasi pemerintahan daerah.

Hubungan antara Sultan dengan Bupati telah digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20/2015, pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan hubungannya bersifat kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya terkait pelestarian nilai-nilai tradisional, adat dan budaya. Kemitraan keduanya akan mewujudkan dan menjaga harmoni kehidupan multi etnis di Sumbawa. Setiap butir/point faktor internal dan eksternal harus saling terkait dengan selaras dalam bentuk kebijakan dan implementasi program pembangunan. Harmoni sosial akan dapat terwujud jika ada kesesuaian kebijakan atau program antara butir-butir faktor internal dengan butir-butir faktor eksternal. Kebijakan dan program kesultanan terkait dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah memfasilitasi program dari kesultanan. Kegiatan tersebut termasuk perlindungan dan perawatan lingkungan cagar budaya yang penting untuk pembelajaran sejarah yang kontekstual (Khakim dkk., 2021).

## KESIMPULAN

Etnis Sumbawa memiliki sejarah panjang berinteraksi dan terbuka menerima kehadiran etnis-etnis pendatang karena dari segi fisik, bahasa dan budaya etnis ini tumbuh dari percampuran dengan etnis-etnis pendatang. Pada masa Kesultanan Sumbawa kehidupan harmoni multietnis bertumbuh subur karena mendapat akomodasi dari kebijakan sultan, sehingga berbagai etnis pendatang difasilitasi baik pemukimannya maupun tempat beribadah. Akan tetapi pasca masa kesultanan, bangunan kehidupan harmoni multietnis tersebut seolah-olah lenyap, karena terjadinya konflik bernuansa etnis, yang berulang. Model harmoni sosial ini dikonstruksi untuk mengantisipasi terulangnya konflik. Gambaran model dirumuskan secara visual dan simbolik menggunakan teks Istana Dalam Loka, situs rumah panggung kembar warisan Kesultanan Sumbawa, karena menyimbolkan kehidupan harmoni multietnis di masanya. Model ini terbangun atas komponen yang saling berkaitan, yakni Faktor-faktor Internal, Faktor-faktor Eksternal. Konstruksi model ini bersifat Kontekstual, dan Perbaikan Model Kontekstual Secara Berkelanjutan. Faktor-faktor Internal adalah faktor yang berasal dari budaya antar etnis di Sumbawa yang ditengarai menjadi akar terjadinya konflik antar etnis tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar budaya etnis yang dipandang terkait dengan terjadinya konflik antar kedua etnis tersebut (misal, ketimpangan akses sumberdaya ekonomi dan politik).

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku dan Jurnal

- Borg, W. R. dan Gall, M. D. 1983. *Educational Research: An Introduction*. London: Longman, Inc.
- Fisabilillah. 2018. *Pemimpin yang Tidak Melawan Arus (Sejarah Pemikiran Sultan Muhammad Kaharuddin III)*. Sumbawa Besar: Pajenang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa.
- Harris, M. 1984. *Kemunculan Teori Antropologi Jilid 2*. Terjemahan Hasiym Awang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia
- Iskandar. 2010. *Konflik Etnis Samawa dan Bali*, (Online), ((M N L Khakim dkk., 2021)), diakses 21 April 2015.
- Ismain, K. 2019. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dari Harmoni Kehidupan Multi Etnis di Kesultanan Sumbawa". *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 13 No. 2, hlm. 206-216.
- Khakim, M. N. L., Insani, N., Anggraeni, R. M., dan Lailah, E. T. N. 2020. *Review of Tourism Geography to Preservation of Barong Ider Bumi Cultures in Banyuwangi Regency Indonesia*. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 8, No. 3, hlm. 7.
- Khakim, M. N. L., Ramadhan, D. D. N., Dhieba, F., dan Putri, Y. S. K. 2020. "Kegiatan Perawatan dan Pengenalan Wisata Situs Sejarah pada Zaman Kolonial Makam Dinger di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu". *Jurnal Praksis dan Dedikasi*, Vol. 1, No. 3, hlm. 6-10.
- Khakim, M. N. L., Sulisty, W. D., Yuliati, Hudiyanto, R. R., dan Afhimma, I. (2021). *Historical learning based on outdoor learning and environmental insight as implementation of the utilization of Gua Suci sites in Tuban*. IOP Conference

- Series: Earth and Environmental Science, 747(1), 012050.  
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012050>
- Khakim, Moch. N. L. 2018. Kesadaran Sejarah Dalam Novel 'Menunggu Beduk Berbunyi' Hamka (1950) Sebagai Pengembangan Materi Ajar Sejarah Indonesia Modern. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 163–175.
- Khakim, Moch. N. L., Fabian, Alwi, Prasetyo, Gusmaro Yoga, & Mutiara, Shinta. 2019. Museum Musik Indonesia sebagai Wisata Edukasi di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 1, hlm. 67–78.
- Marzali, A. 2003. 'Perbedaan Etnis dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio Ekonomi terhadap Kekerasan di Kalimantan', dalam Murni Jamal(ed). *Konflik Komunal Indonesia Saw mi*. Leiden-Indonesia: INIS dan PBB.
- Purnama (2013, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/783-rusuh-sumbawa-dan-peran-lembaga-adat>, diakses tgl 26 Nopember 2019
- Suparlan. 2010. Hak Budaya Komuniti dan Integrasi Kebangsaan. <http://etnobudaya.net/2010/11/11/hak-budaya-komuniti-dan-integrasi-kebangsaan/>. Diakses tanggal 10 November 2019
- Suyitno, I. 2015. Pendekatan Budaya dalam Pemahaman Perilaku Budaya Etnik. Makalah dalam Prosiding International Conference Contribution of History for Social Sciences And Humanities (ISBN: 978-602-7150-65-2). Malang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Zuhdi. 2014. Identitas, Sejarah, dan Pendidikan Sejarah di Indonesia. Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Sejarah di Tengah Perubahan (ISBN: 978-602-71506-1-4). Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

### Website

Kompas.com